KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : PKS sentil belanja infrastruktur
**Tanggal** : Rabu, 23 Oktober 2019
**Surat Kabar** : Indo Pos
**Halaman** : 2

# PKS Sentil Belanja Infrastruktur

**JAKARTA**–Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo meminta pemerintah selektif dalam merencanakan belanja infrastruktur. Selektif dalam perencanaan belanja infrastruktur agar bisa membangun Indonesia maju di 2045 sehingga menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia.

"Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik 100 persen dari Rp206,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp415 triliun di tahun 2019. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55 persen. Angka pertumbuhan stagnan di 5 persen. Ini sangat menyedihkan," ujar Sigit di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).


Sigit Sosiantomo
PKS.ID

Seharusnya, kata Sigit, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan karena anggaran infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerja. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan selama periode I Jokowi hanya turun 1,55 persen dari sekitar 10,96 persen September 2014 menjadi 9,41persen Maret 2019.

"Alokasi infrastruktur naik 100 persen, tapi hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan bertolak belakang dari keinginan presiden yang optimis tahun 2045 seabad Indonesia merdeka Indonesia menjadi negara maju dengan penghasilan rata-rata per orang per bulan Rp27 juta rupiah," jelasnya.

Menurut Sigit, dari pengalamanan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat.

"Jadi, ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya," paparnya.

Sigit menyebut, dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program, Juni 2018, Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastuktur Indonesia tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang. Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi Goverment Contractinf Agency (CGA) sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek.

Akibatnya Indonesia kalah bersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2019 ini juga turun ke posisi 50. Salah satu indeks yang diukur adalah infrastruktur yang juga turun ke posisi 72.

Artinya, pembangunan infrastruktur yang masif masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu perlu perencanaan yang tepat, implementasi yang benar agar menumbuhkan perekonomian yang tinggi.

Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur Jokowi diperiode kedua ini. **(nas)**